

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan telah menjadi hambatan yang serius dalam pembangunan suatu negara, sehingga saat ini masalah kemiskinan masih menjadi permasalahan yang berat bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia. Di Indonesia permasalahan mengenai kemiskinan sangat vital karena masalah yang ditimbulkan oleh kemiskinan ini tidak hanya berdampak pada ekonomi masyarakat, namun juga sangat berpengaruh pada aspek sosial. Sayangnya, masalah kemiskinan belum dapat teratasi dengan baik sehingga masih berjalan hingga sekarang. Soerjono Soekanto mendefinisikan kemiskinan dengan suatu keadaan seseorang tidak lagi sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga baik mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.¹ Menurut pernyataan Cahyat, dikutip dari M. Sabeth Abilawa, menyatakan bahwa pada penghujung abad 20 telah muncul pengertian terbaru mengenai kemiskinan yaitu, bahwa kemiskinan juga mencakup dimensi kerentanan, ketidakberdayaan, dan tidak mampu menyampaikan menyampaikan aspirasi (*voicelessness*). Jadi kemiskinan berwajah majemuk atau bersifat multi dimensi.² Kemiskinan masih menjadi permasalahan utama bagi negara berkembang, salah

¹ Nikita Rosa Damayanti. 2022. Kemiskinan: Pengertian, Penyebab, Hingga Jenis-Jenisnya. Website detik.com. Diakses dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5882126/kemiskinan-pengertian-penyebab-hingga-jenis-jenisnya>. Dikases pada 19 Oktober 2023.

² M. Sabeth Abilawa. 2010. Studi Determinan Karakteristik Rumah Tangga Miskin Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Analisis Data Susenas). *Tesis*. Universitas Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

satunya negara kita, Indonesia. Pemerintah masih mencari berbagai cara terbaik memberantas kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar salah satu cita-cita bangsa Indonesia dapat terwujud yaitu menjadi bangsa yang mempunyai masyarakat yang makmur. Kemiskinan juga merupakan akar dari berbagai masalah sosial di masyarakat.

Kesejahteraan sosial adalah sebuah hak asasi manusia yang sangat mendasar, kesejahteraan sosial dapat pula diartikan sebagai suatu keadaan di mana telah terpenuhinya kebutuhan hidup dan mendapatkan penghidupan yang layak. Kesejahteraan sosial menjadi salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari cita-cita kemerdekaan Indonesia dengan tujuan membangun negara. Hal tersebut tercantum dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal ini secara khusus membicarakan tentang kesejahteraan sosial di Indonesia dan secara langsung mengamanatkan tanggung jawab kepada pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Pemikiran bahwa kesejahteraan sosial merupakan tujuan akhir pembangunan nasional mengandung makna bahwa ada suatu kondisi yang menentukan pencapaiannya. Prasyaratnya adalah kualitas sumber daya manusia dan terpenuhinya kebutuhan sosial primer setiap warga negara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan

kesejahteraan sosial atau sistem kehidupan sejahtera setiap warga negara, kedua kondisi tersebut harus diselesaikan secara simultan dan dari semua sisi.³

PPKS atau (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) menurut Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial mendefinisikan bahwa PPKS atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial secara memadai dan wajar

Pemerintah tentunya telah melakukan berbagai upaya dan solusi atas permasalahan kemiskinan dan masalah sosial yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan melakukan pengelompokan terhadap kelompok penduduk yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus dari pemerintah dan pihak-pihak terkait. Kelompok tersebut kemudian disebut dengan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial). Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012, mencatat dan mengelompokkan 26 jenis PPKS, salah satunya adalah WRSE atau Wanita Rawan Sosial Ekonomi.⁴ Salah satu masyarakat miskin yang menjadi perhatian adalah perempuan miskin, perempuan yang memiliki keterbatasan pada pemenuhan kehidupan sehari-hari dapat disebabkan karena adanya diskriminasi gender dan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak bagi perempuan. Oleh karena itu, perempuan-perempuan yang memiliki keterbatasan finansial sulit untuk keluar dari permasalahan kemiskinan. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Sosial nomor 8

³ Suradi. 2007. Pembangunan Manusia, Kemiskinan Dan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Vol 12, No. 03. Hlm 2.

⁴ Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

tahun 2012 menjelaskan bahwa wanita rawan sosial ekonomi adalah wanita berusia 18 tahun sampai 59 tahun, menjadi pencari nafkah utama keluarga, berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak, dan istri yang ditinggalkan suami.⁵

Salah satu faktor terkuat yang menyebabkan wanita dapat masuk dalam golongan wanita rawan sosial ekonomi adalah karena kemiskinan. Kemiskinan yang menyangkut pada sulitnya akses umum yang dia dapatkan seperti pendidikan, pekerjaan, serta sarana dan prasarana yang lainnya.⁶ Wanita rawan sosial ekonomi merupakan seorang wanita dewasa yang telah berusia 18-59 tahun dengan status menikah, belum menikah, bercerai, atau janda dan tidak memiliki penghasilan cukup guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.⁷ Keadaan finansial keluarga yang tidak sehat mendorong para wanita rawan sosial ekonomi ini untuk dapat berguna guna menjalani kehidupan sehari-hari, akan tetapi terdapat permasalahan rendahnya pendidikan yang dimiliki serta tidak adanya keterampilan yang dimiliki berakibat pada sulitnya mendapatkan akses pekerjaan yang layak.⁸ Wanita rawan sosial ekonomi yang menjadi tulang punggung keluarga oleh sebab itu kesejahteraan wanita wajib menjadi agenda penting dalam program pengentasan kemiskinan, karena

⁵ *Ibid.*

⁶ Sarah Anpiliandra. Peran Pekerja Sosial dalam Pemberdayaan Komunitas Perempuan Rawan Sosial Ekonomi. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*. Volume 4, No.1, hal 29.

⁷ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia. Penanganan Wanita Rawan Sosial Ekonomi. Website panrb. Diakses dalam <https://sippn.menpan.go.id/pelayanan-publik/8009696/dinas-sosial-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak/penanganan-wanita-rawan-sosial-ekonomi>. Diakses pada 20 Oktober 2023.

⁸ Ginola Tri Shindy, Dkk. 2022. Persepsi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (Prse) Terhadap Peran Ganda Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Neo Societal*, Vol. 7, No. 3. Hal 113.

kesejahteraan wanita umumnya bisa mencerminkan kesejahteraan keluarga dan dapat menjadi jaminan bagi kesejahteraan golongan PPKS lainnya, seperti anak-anak, lansia, dan anggota keluarga yang menderita penyakit. Hal ini berkaitan dengan peranan produktif yang melekat pada kaum perempuan. Peran produktif merupakan peranan yang berhubungan langsung dengan tanggung jawab pengasuhan anak dan tugas-tugas domestik yang dibutuhkan untuk menjamin pemeliharaan dan reproduksi tenaga kerja yang menyangkut kelangsungan keluarga contohnya seperti memasak, memelihara dan mengasuh anak serta anggota keluarga lainnya.⁹ Wanita rawan sosial ekonomi memegang peranan sebagai kepala keluarga yang tidak hanya bertanggungjawab atas dirinya melainkan anggota keluarga dan kesejahteraan keluarganya. Sebagai seorang kepala keluarga, perempuan memegang peranan ganda yang dijalankannya demi memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial. Wanita rawan sosial ekonomi biasanya datang dari kalangan menengah ke bawah, wanita rawan sosial ekonomi memiliki permasalahan yang dapat menghambat kehidupan sosial dan ekonomi.¹⁰

Atas permasalahan tersebut, pemerintah membuat sebuah program yaitu usaha ekonomi yang diperuntukkan sebagai pengembangan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan program usaha ekonomi produktif adalah sebuah program untuk memberikan pemberdayaan dengan bantuan penguatan modal usaha

⁹ Alia Fajarwati, dkk. 2017. Strategi untuk Mengatasi Permasalahan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). *Jurnal Majalah Geografi Indonesia*. Vol. 31, No.1. Hal 23.

¹⁰ Grinola. *Op.cit.* Hlm 114.

bagi kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat. Pengembangan dan peningkatan usaha produktif untuk mendorong terjadinya peningkatan kreativitas dan kegiatan usaha pada kelompok masyarakat.¹¹ Ekonomi produktif adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memberikan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan ditujukan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara perorangan. Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah program yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, terutama kepada kelompok rawan sosial seperti wanita, untuk mandiri secara ekonomi melalui pendampingan, pelatihan, pemberian modal usaha, dan akses ke pasar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi tingkat kemiskinan di kalangan masyarakat.

Wanita rawan sosial merujuk kepada kelompok wanita yang memiliki risiko tinggi terhadap kemiskinan, kekerasan, dan diskriminasi. Mereka mungkin mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan, lapangan kerja formal, modal usaha, serta memiliki peran ganda dalam mengurus keluarga dan rumah tangga. Melalui program UEP, pemerintah dan lembaga non profit bekerja sama untuk memberikan dukungan kepada wanita ini untuk memulai usaha ekonomi yang produktif. Program UEP untuk wanita rawan sosial berfokus pada pemberdayaan

¹¹ Gramedia blog. Memahami Pengertian Ekonomi Produktif dan Contoh Peluang Usaha Ekonomi Produktif. Diakses dalam <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-ekonomi-kreatif-contoh/>, diakses pada 15 Oktober 2023.

ekonomi dan sosial mereka. Dalam program ini, wanita rawan sosial diberikan pelatihan keterampilan, pendampingan, dan dukungan teknis dalam memulai dan mengelola usaha kecil. Selain itu, program ini juga membantu dalam membangun jaringan dan kerja sama dengan pelaku usaha lain, organisasi lokal, dan lembaga keuangan untuk memperluas pasar dan meningkatkan akses ke peluang usaha.

Dengan adanya program UEP, diharapkan wanita rawan sosial dapat meningkatkan pendapatan mereka, mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam mengelola usaha, serta meningkatkan peran dan pengaruh sosial mereka. Program ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi wanita tersebut, tapi juga untuk keluarga mereka serta masyarakat secara keseluruhan dengan mengurangi ketimpangan, meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi ekonomi wanita dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Dari banyaknya literatur yang ada, terdapat penelitian yang mengaji mengenai usaha ekonomi produktif sebagai peningkatan ekonomi dan pemberdayaan bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penelitian tersebut diantaranya dilakukan oleh Isnaeni, dkk dalam penelitiannya yang dilakukan di Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep menyimpulkan bahwa implementasi usaha ekonomi produktif memberikan manfaat yang besar bagi para penerimanya.

Dengan adanya bantuan program ini, masyarakat dapat mengembangkan usaha yang

mereka miliki dan menaikan penghasilan mereka.¹² Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Roni Hermoko, penelitian ini memfokuskan pada usaha ekonomi produktif bagi para lansia potensial di Yogyakarta. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu dana yang didapatkan untuk melaksanakan program ini sangat kecil dari keseluruhan total anggaran dinas sosial, sehingga hal ini berdampak pada penerima, karena manfaat yang didapatkan sangat kecil.¹³ Ketiga, penelitian oleh Nur Iham yang memfokuskan pada program usaha ekonomi produktif pada fakir miskin. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah implementasi program usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh suku dinas sosial Jakarta Barat berhasil dijalankan, dan berhasil membantu meningkatkan kesejahteraan para penerimanya.¹⁴ Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Pairan, penelitian ini mengenai pengembangan kebijakan usaha ekonomi produktif dalam pengentasan kemiskinan di desa. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini terdapat beberapa tahap yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk pengembangan program ini.¹⁵ Serta, penelitian terakhir yang dilakukan oleh Yusen Risal yang mengaji mengenai efektivitas program usaha ekonomi produktif bagi wanita rawan sosial ekonomi. Hasil dari penelitian ini program usaha ekonomi

¹² Isnaeni, dkk. "Implementasi Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Seagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep". *Jurnal Intelektiva* Vol. 3 No.2, 2022, Hal 9-16.

¹³ Roni Hermoko. 2018. *Tesis: Implementasi Program Usaha Ekonomi Produktif Bagi Lansia Potensial di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta.

¹⁴ Nur Iham. 2021. Skripsi. "Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Suku Dinas Sosial Jakarta Barat dalam Peningkatan Kesejahteraan Fakir Miskin di Kecamatan Tambora. Jakarta": Univeristas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

¹⁵ Pairan. 2019. Implementasi Pengembangan Kebijakan Usaha Ekonomi Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa. *Jurnal PKS* Vol. 18 No 2. Hal 113-122.

produktif belum efektif yang disebabkan tidak adanya tujuan yang akan dicapai.¹⁶

Dari kelima penelitian ini, kebanyakan berfokus pada implementasi program usaha ekonomi produktif yang diberikan kepada fakir miskin.

Peneliti melihat kajian seputar implementasi program UEP terhadap wanita rawan sosial ekonomi belum banyak dilakukan. Padahal, isu tentang wanita rawan sosial ekonomi merupakan salah satu isu penting dalam pengentasan kemiskinan. Karena peran wanita sangat penting dalam sebuah keluarga, kesejahteraan pada wanita umumnya menggambarkan kondisi kesejahteraan sebuah keluarga dan bisa menjadi jaminan bagi kesejahteraan kalangan PPKS lainnya seperti anak-anak, lansia, dan anggota keluarga yang mengidap penyakit. Pada penelitian ini peneliti ingin berfokus untuk melihat bagaimana implementasi program usaha ekonomi produktif yang diberikan kepada wanita rawan sosial sebagai upaya penganan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Selain melihat bagaimana implementasi program usaha ekonomi produktif pada wanita rawan sosial ekonomi, penelitian ini ingin mengaji tentang dampak dari implementasi program tersebut serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program tersebut.

¹⁶ Yusen Risal. 2017. *Skripsi: Efektivitas Program Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada Wanita Rawan Sosial Ekonomi oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang*: Padang. Universitas Andalas

1.2 Rumusan Masalah

Kemiskinan masih menjadi masalah yang perlu diperhatikan di berbagai kota di Indonesia. Kemiskinan yang terjadi di perkotaan seringkali tersembunyi dan tidak terlihat seperti kemiskinan yang ada di pedesaan, namun fakta yang ada di lapangan, banyak orang kota yang hidup dalam keadaan miskin dan kesulitan.¹⁷ dalam persoalan kemiskinan, salah satu yang juga menjadi perhatian yaitu kemiskinan pada perempuan.

Secara data keseluruhan tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia meningkat pada tahun 2019-2020. Per September 2020 telah terjadi kenaikan tingkat kemiskinan sebesar dua digit, yaitu dari angka 9,22% pada September 2019 menjadi 10,19% pada September 2020. Dari segi jumlah juga dikatakan meningkat, semula 24,79 juta menjadi 27,55 juta pada September 2020. berdasarkan tempat tinggal, kemiskinan pada wilayah perkotaan juga meningkat dari angka 6,56% menjadi 7,88% pada tahun 2020.¹⁸

¹⁷ Universitas Islam Annur Lampung. 2023. Kemiskinan Kota di Indonesia: Definisi, data, penyebab, solusi.

¹⁸ Dwi Hadya J. 2021. Penduduk Miskin Indonesia Bertambah Jadi 27,55 Juta per Aeptember 2020. website databoks. Diakses dalam <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/15/penduduk-miskin-indonesia-bertambah-jadi-2755-juta-per-september-2020#:~:text=No.&text=Pandemi%20Covid%2D19%20memberikan%20dampak,2019%20menjadi%2027%2C55%20juta>. Diakses pada 01 Maret 2024.

Tabel 1.1
Angka Kemiskinan Pada Wilayah Perkotaan di Sumatera Barat

Wilayah	2018	2019	2020
Bukittinggi	4,92%	4,60%	4,54%
Padang Panjang	5,88%	5,60%	5,24%
Payakumbuh	5,77%	5,68%	5,65%
Solok	3,30%	3,24%	2,77%
Pariaman	5,03%	4,76%	4,10%
Sawahlunto	2,34%	2,17%	2,16%
Padang	4,70%	4,48%	4,40%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.

Angka kemiskinan di wilayah perkotaan Provinsi Sumatera Barat juga sangat beragam, dari data yang diperlihatkan, kemiskinan di Padang Panjang pada tahun 2018 merupakan angka paling tinggi untuk angka kemiskinan di wilayah perkotaan dengan angka kemiskinan mencapai 5,88% dan pada tahun tersebut kemiskinan terendah terdapat di Kota Sawahlunto dengan angka 2,34% tingkat kemiskinan. Kemudian, pada tahun 2019 kemiskinan di Kota Payakumbuh menjadi sebesar 5,68% menjadikan Kota Payakumbuh sebagai wilayah perkotaan di Sumatera Barat dengan angka kemiskinan tertinggi di tahun 2019. Sedangkan, angka kemiskinan terendah pada tahun 2019 ada di Kota Sawahlunto dengan angka 2,16%. pada tahun berikutnya, Kota Payakumbuh masih menjadi wilayah perkotaan dengan angka kemiskinan tertinggi dengan angka 5,65%, sedangkan Kota Sawahlunto masih menjadi wilayah kota di Sumatera Barat dengan kemiskinan terendah yaitu pada angka 2,16%.

Dari data-data kemiskinan yang telah dijabarkan tersebut, terdapat salah satu golongan acap kali terlupakan dalam hal penanganan kemiskinan, perempuan sering terlupakan karena adanya berbagai faktor seperti diskriminasi dan kesenjangan.

Perempuan merupakan salah satu kelompok yang berisiko masuk dalam golongan kemiskinan. Jumlah wanita secara statistik lebih banyak dibanding dengan pria, tetapi perempuan cenderung memiliki keterbatasan akses dalam pembangunan. Persentase perempuan miskin lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki pada sepanjang tahun 2015-2019. Pada tahun 2019, jumlah perempuan miskin sebesar 12,8 juta jiwa, tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.¹⁹ Pada tahun 2020 sendiri persentase penduduk miskin (*head count index*) perempuan terdapat sekitar 9,96%. Menegaskan bahwa 9,96% dari seluruh penduduk perempuan di Indonesia memiliki status miskin.²⁰ Kemiskinan pada perempuan juga terlihat pada perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Persentase kepala rumah tangga perempuan banyak ditemui pada keluarga miskin. Pada Maret 2020, terdapat sekitar 15,88% perempuan kepala rumah tangga dengan status miskin di Indonesia.²¹

Menurut Subandi, yang merupakan Deputy Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas mengatakan bahwa dari

¹⁹ Vivi Yulaswati. 2020. Tanggapan Studi Perlindungan Kesehatan Bagi Perempuan Miskin Di Indonesia. Kementerian PPN/Bappenas. Diakses dalam https://www.smeru.or.id/sites/default/files/events/sesi_1_tanggapan_bappenas.pdf. Diakses pada 22 November 2023.

²⁰ Isti Larasati Widiastuty. Perempuan, Kemiskinan dan Pandemi. Kumparan.com. Diakses dalam <https://kumparan.com/istilaras/perempuan-kemiskinan-dan-pandemi-1vLudUXp6zd/2>. Diakses pada 22 November 2023.

²¹ *Ibid.*

sisi ekonomi, kesenjangan kemiskinan antara perempuan dan laki-laki sangat timpang.

“Kemiskinan perempuan lebih tinggi hampir di semua tingkatan umur dan di hampir semua wilayah. Umur harapan hidup perempuan yang panjang mengalami periode kemiskinan yang lama,”.²²

Kehidupan perempuan yang masuk dalam kemiskinan ini mereka juga tercatat sebagai wanita rawan sosial ekonomi. Wanita rawan sosial ekonomi tergolong kelompok miskin atau yang hidup di bawah garis kemiskinan.²³ Wanita rawan sosial ekonomi memiliki tanggung jawab besar dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan keluarga. Wanita Rawan Sosial Ekonomi tergolong sebagai kaum rentan yang mengalami ketidaksetaraan. Posisi seorang wanita rawan sosial ekonomi memegang peran sebagai kepala keluarga yang tidak hanya bertanggung jawab atas dirinya melainkan anggota keluarga atas kesejahteraan keluarganya. Biasanya, wanita rawan sosial ekonomi mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, atau minimal tidak tamat pendidikan sekolah dasar.

Wanita yang ditinggal oleh suaminya tanpa batas waktu tertentu juga dapat digolongkan ke dalam golongan wanita rawan sosial ekonomi. Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) kebanyakan berasal dari keluarga yang kurang mampu dan

²² Wawancara subandi untuk media ekonomi bisnis.com. Diakses dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200928/9/1297727/ketimpangan-gender-kemiskinan-perempuan-lebih-tinggi-hampir-di-semua-daerah>. Diakses pada 31 Desember 2023.

²³ Fajarina. 2018. Perilaku Komunikasi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi di Kota Bandung. *Jurnal Komunikologi* Vol 15, No 1.

seringkali mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat sekitarnya. Mereka tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan hak yang sama karena diskriminasi dari orang lain, dan faktor-faktor seperti SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) serta budaya patriarki.

Selain itu, banyak dari wanita rawan sosial ekonomi yang menjadi kepala keluarga bagi rumah tangganya. Terdapat pula para wanita yang belum menikah tetapi harus memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya. Karena adanya keterbatasan akses dalam pembangunan membuat mereka terjerumus dalam kehidupan yang serba kekurangan. Di Sumatera Barat sendiri, jumlah WRSE dapat dikatakan cukup banyak dan cenderung bertambah tiap tahunnya. Menurut data dari Buku Data PPKS dan PSKS Sumatera Barat Tahun 2020 jumlah wanita rawan sosial ekonomi di Sumatera Barat pada tahun 2018-2019 cukup meningkat tajam yaitu dari angka 15.081 jiwa bertambah menjadi 24.864 jiwa, tetapi pada tahun berikutnya (2020) mengalami sedikit penurunan pada angka 23.481 jiwa.²⁴

Pada penelitian ini peneliti menfokuskan pada Kota Payakumbuh, jika dilihat dari data keseluruhan masyarakat miskin yang ada di Kota Payakumbuh tiap tahunnya cenderung menurun tetapi sempat naik pada angka 6,61% ditahun 2021.

²⁴ Buku Data PPKS dan PSKS Sumatera Barat tahun 2020.

Tabel 1.2
Angka Kemiskinan Kota Payakumbuh dari Tahun 2019-2023.

No	Tahun	Jumlah
1	2019	5,68%
2	2020	5,65%
3	2021	6,16%
4	2022	5,66%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh

Dari data tersebut dilihat bahwa angka kemiskinan yang ada di Kota Payakumbuh turun setiap tahunnya, hanya pada tahun 2021 terjadi lonjakan yang menyebabkan angka kemiskinan pada tahun tersebut lebih tinggi daripada tahun sebelum dan setelahnya. Tetapi, jika dilihat dari data wanita rawan sosial yang ada di Kota Payakumbuh justru berbanding terbalik dengan data kemiskinan yang terus menurun. Dari data yang peneliti dapatkan presentase wanita rawan sosial ekonomi justru bertambah setiap tahunnya, padahal seperti yang ditegaskan diawal, wanita rawan sosial ekonomi masuk dalam kategori masyarakat miskin.

Tabel 1.3

Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi di Kota Payakumbuh tahun 2019-2020.

No	Tahun	Jumlah
1.	2018	625 Jiwa
2.	2019	1. 156 Jiwa
3.	2020	1. 411 Jiwa
4.	2021	1. 191 Jiwa
5.	2022	1. 243 Jiwa

Sumber: Buku Profil Kependudukan Kota Payakumbuh Tahun 2018-2022.

Dari tahun 2018 yang terdapat 625 jiwa penduduk yang masuk dalam golongan wanita rawan sosial ekonomi, kemudian di tahun-tahun berikutnya terdapat kenaikan jumlah seperti di tahun 2019 menjadi 1.156 jiwa, kemudian di tahun berikutnya (2020) kembali naik menjadi 1.411 jiwa. Tetapi, pada tahun 2021 sempat terdapat penurunan menjadi 1.191 jiwa, hingga di tahun berikutnya kembali naik menjadi 1.243 jiwa.

Dari data yang telah dipaparkan di atas, angka kemiskinan di Kota Payakumbuh cenderung terus menurun tiap tahunnya, tetapi angka wanita rawan sosial ekonomi justru lebih banyak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan hal tersebut peneliti berasumsi bahwa implementasi program usaha ekonomi produktif ini tidak berdampak besar terhadap penanganan wanita rawan sosial ekonomi di Payakumbuh, terlihat dari angka kemiskinan yang menurun tiap tahun tetapi tidak dibarengi dengan penurunan angka wanita rawan sosial ekonomi di Kota Payakumbuh. Padahal, Kementerian Sosial Republik Indonesia telah memiliki sebuah program yang bernama UEP atau Usaha Ekonomi Produktif sesuai dengan Peremensos No. 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Kreatif kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin. Untuk itu seharusnya pemerintah Kota Payakumbuh dapat memanfaatkan program tersebut dan menyalurkannya pada masyarakat yang berperan sebagai PPKS sebagai upaya penanganan terhadap PPKS yang salah satunya adalah WRSE.

Ada beberapa data temuan awal yang peneliti dapatkan mengenai bagaimana implementasi program usaha ekonomi produktif yang berjalan di Kota Payakumbuh.

Pertama, peneliti menemukan tidak adanya kejelasan mengenai kapan saja program ini diadakan apakah berjalan tiap tahun atau hanya di tahun-tahun tertentu, seperti yang peneliti lihat melalui *website* dinas sosial Kota Payakumbuh tidak ada pemberitahuan terkait layanan program ekonomi produktif ini. Sedangkan, program-program pelayanan lainnya tertera dalam halaman *website*. **Kedua** peneliti melihat sistem untuk mendapatkan bantuan program ini belum jelas. Peneliti melihat masyarakat yang menerima bantuan program ini ada yang memang mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan program ada juga yang didatangi langsung oleh Dinas Sosial. Berdasarkan latar belakang dan temuan yang peneliti yang diuraikan di atas, peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu; Bagaimana Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Produktif pada Wanita Rawan Sosial Ekonomi Kota Payakumbuh.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kemudian mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan program usaha ekonomi produktif di Kota Payakumbuh sebagai upaya penanganan wanita rawan sosial ekonomi di Kota Payakumbuh.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi dampak positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Politik yang berfokus pada Implementasi Kebijakan Publik dan sebagai bahan informasi ilmiah penelitian-penelitian yang mengaji tentang Implementasi Kebijakan Publik khususnya mengenai implementasi pada peraturan daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam konteks implementasi kebijakan publik di Indonesia karena menyangkut kemiskinan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah di Indonesia agar dapat mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat secara efektif .